

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Prancis adalah bangsa merdeka di Eropa Barat dan pusat pemerintahan yang besar, Prancis juga merupakan sebagai negara Eropa terbesar ketiga setelah Rusia dan Ukraina. Prancis adalah negara Republik semi-presidensial, dengan mengadopsi nilai-nilai "*Liberty, Equality, Fraternity*". Prancis telah menjadi negara yang terlibat dalam beberapa peristiwa paling penting dalam sejarah Eropa, bahkan menjadi salah satu negara yang turut menjadi sejarah penting lahirnya paham liberalisme di Eropa. Lahirnya paham liberalisme di Prancis tidak terlepas dengan sejarah revolusi Prancis, hingga pendirian Republik kelima yang saat ini masih diterapkan. Sehingga pasca perang dunia berakhir, Prancis aktif mempromosikan nilai-nilai liberal dan demokrasi di Eropa. Selain itu juga Prancis menjadi salah satu negara yang menginisiasi terbentuknya lembaga Uni Eropa sebagai solusi pasca perang panjang di Eropa (NWE, 2018) .

Prancis saat ini telah mengalami krisis terbesar di Republik Kelima, Prancis telah mengalami krisis mencapai tahap akhir, bukan hanya dalam segi ekonomi tetapi juga dalam politik dan sosial. Prancis telah mengalami stagnasi ekonomi selama bertahun-tahun dalam dekade terakhir, karena beberapa faktor tertentu dan kapitalisme negara tersebut tidak lagi berfungsi. Perekonomian Prancis telah

mengalami penurunan bertahap selama bertahun-tahun, tanpa ada Presiden yang telah melakukan perbaikan (Rohr, 2013). Setidaknya dua masa jabatan pemerintahan terakhir yang menjadi masa terburuk, dengan meninggalkan warisan dengan angka pengangguran yang tinggi, ekonomi yang terhenti dan kekacauan politik. kedua Presiden tersebut yaitu Presiden Nicholas Sarkozy dari partai UMP (2007-2012), yang kedua saat Prancis dipimpin oleh Presiden dari Partai Sosialis yaitu Francois Hollande (2012-2017) (Wall, 2014, pp. 60-61).

Pada masa pemerintahan Presiden Hollande, kondisi Prancis mengalami perpecahan politik dipemerintahannya. Selain telah menerima warisan kondisi Prancis yang buruk, Hollande juga dianggap tidak mampu memperbaiki situasi Prancis. Hingga masa jabatan ditahun pertama, Hollande sudah kehilangan popularitasnya dikalangan masyarakat bahkan para elit politik partainya. Setidaknya Presiden Hollande telah melakukan pembubaran pemerintahan dan membentuk kabinet baru, dengan keempat kalinya sejak Francois Hollande menjadi Presiden dari tahun 2012 yang lalu. Bahkan perombakan kabinet tersebut didasari atas kondisi Prancis yang mengalami stagnasi ekonomi dan menghadapi ketidakpuasaan sosial masyarakat (Chesnot, 2014). Bahkan pada masa jabatannya, pengangguran hampir 11% dan pertumbuhan pada tahun 2014 diperkirakan hanya 0,5%, sementara Hollande telah gagal memberikan tingkat pertumbuhan yang dijanjikan pada awal masa jabatannya. (Penketh, 2014).

Masalah ekonomi yang terus menurun menjadikan Prancis mengalami ketidakstabilan, yang membuat masyarakat tidak lagi mempercayai pejabat

pemerintah. Salah satu janji kampanye Hollande juga terkait program “anti-austerity”, yang pada realitasnya Hollande menjalankan kebijakan penghematan. Bahkan kebijakan pemerintah untuk penghematan hanya memperburuk, karena penghematan tersebut berimbas pada orang-orang miskin yang semakin sulit (Aldelman, 2014).

Prancis merupakan salah satu negara yang sangat berpengaruh dalam perkembangan Uni Eropa, dibuktikan bahwa Prancis selalu terlibat dalam hampir semua sektor bersama anggota lainnya dalam merumuskan kebijakan di Uni Eropa. Prancis juga bukan hanya bagian dari ekonomi ‘regional’ Eropa dan struktur politik, tetapi juga telah diintegrasikan ke dalam sistem ‘global’. Prancis telah terlibat dalam beberapa perjanjian lembaga tersebut. Seperti adanya kesepakatan *The Treaties of Paris* pada tahun 1951 dan *Rome* pada tahun 1957, *Single European Act (SEA)* pada tahun 1986 dan *Treaty on European Union (TEU)* pada tahun 1992. Kesepakatan tersebut bukan hanya membangun institusi bersama dalam pembuatan kebijakan, tetapi juga telah menetapkan empat tujuan utama kebijakan seperti pertanian, serikat pabean dalam proses GATT, pasar tunggal, mata uang tunggal, banyak kebijakan lain yang telah dikembangkan dalam lembaga tersebut seperti dalam isu lingkungan, industri, keamanan, kebijakan luar negeri dan kebijakan lainnya (Caton, 2015, pp. 78-79).

Dinamika dunia internasional di era kontemporer saat ini pada kenyataannya telah memberikan banyak tantangan terhadap kinerja UE. Seperti halnya dilansir dari Eurobarometer yang menerbitkan sebuah laporan dimana beberapa tahun terakhir UE dalam situasi keadaan darurat. Laporan tersebut berisikan bagaimana masyarakat

Eropa mulai memperhatikan masalah yang ada secara jangka panjang yang akan mempengaruhi kepentingan nasional negara. Laporan tersebut melampirkan data adanya penurunan angka kepercayaan (pesimis) masyarakat terhadap kinerja UE dalam isu yang terjadi dianggap tidak terselesaikan dengan baik. Berangkat dalam fase krisis UE di tahun 2011-2012 dengan angka pesimis 46%, hingga adanya isu pengungsi dan terorisme yang pecah di tahun 2015-2016 yang masih menduduki angka pesimis yang cukup tinggi diangka 44% (Bildt, 2017).

Setelah berhasilnya Inggris keluar dari UE yang diusulkan oleh partai populis tentu telah mempengaruhi publik opini masyarakat Eropa secara keseluruhan. Adanya keputusan Brexit telah dijadikan legitimasi politik dalam strategi kampanye beberapa kelompok populis Eropa di tahun 2017. Bahkan Brexit sebagai bentuk Euroskeptis telah dijadikan momentum untuk mendorong agenda mereka. Sehingga partai-partai populis tersebut seperti *Front National* di Prancis, *Alternatif For Germany* di Jerman, *Party of Freedom* di Belanda dan partai populis lainnya telah melakukan pertemuan untuk memperkuat strategi kampanye 2017 (Connolly, 2017).

Menarik bahwa di tahun 2017 adalah tahun dimana partai sayap kanan dapat maju mengikuti serangkaian agenda pemilu di beberapa negara Eropa. Seperti halnya di Prancis, Marine Lee Pen dengan Partai Sayap kanan-jauh Front Nasional (FN) mampu berhasil maju pada putaran kedua sebagai kandidat presiden yang artinya partai tersebut telah berhasil menjadi oposisi utama di Prancis. Setelah FN didirikan pada tahun 1972 oleh Jean-Marine Lee Pen dengan poros partai yang lebih ekstrem. Sehingga pada tahun 2011, Marine Lee pen telah mengambil alih FN dengan

memberikan transformasi yang dikenal dengan *'De-demonization'* atau mengubah wajah baru FN (Ivaldi, 2014, pp. 1-4). Sebab terdapat perbedaan ideologi FN lama dibawah Jean-marine Lee Pen dengan FN baru yang dibawah oleh Marine Lee Pen. Walaupun baik Jean Marine Lee Pen ataupun Marine Lee Pen sama-sama membawa pesan populis, namun populisme dibawah Jean tidak begitu mencolok karena dia lebih membuat penekanan elemen radikal yaitu rasis dan anti-semitisme. Sebaliknya, FN dibawah pimpinan Marine Lee Pen lebih menekankan pada retorika populisme. Sejak Marine Lee Pen memimpin FN telah memberikan peningkatan secara signifikan dalam partai tersebut yaitu dalam peningkatan jumlah keanggotaan, peningkatan suara pemilu, serta peningkatan opini publik (Stockemer & Barisione, 2016, pp. 2-6).

Gerakan sayap kanan Front Nasional (FN) telah menjadi bagian yang sangat penting dalam budaya politik Perancis. Front Nasional (FN) telah menjadi partai yang lebih kuat dari sebelumnya. Menguatnya partai Front Nasional (FN) juga adanya situasi Perancis yang buruk dimasa pemerintahan Hollande. Dimana pertumbuhan ekonomi yang rendah, serta angka pengangguran yang semakin tinggi, hingga adanya krisis pengungsi Eropa akibat perang Suriah dan Irak membuat masyarakat Perancis menjadi salah satu negara yang paling pesimis atas kelangsungan hidup mereka dalam dunia global. Bahkan saat warga Perancis diwawancarai, sekitar 67% mengatakan bahwa negara mereka menurun akibat dampak negatif dari globalisasi. Adanya serangan terorisme yang menewaskan 300 orang dalam jangka dua tahun menambah kekhawatiran masyarakat Perancis. Sehingga kekhawatiran masyarakat

tersebut dijadikan fokus Lee Pen dalam kampanye 2017 untuk merangkul kaum muda dan perempuan (Corre, 2017, pp. 3-6). Kebijakan tersebut dirumuskan dalam wacana 144 komitmen “Marine Le Pen 2017” yang dipublikasi langsung dalam web resmi FN (National, 2017).

Program kampanye Marine Le Pen dalam bentuk proposal “Marine Le Pen 2017” telah menuai banyak perdebatan dikalangan akademisi dan pejabat politik. Selain menampilkan beberapa program yang jelas bertolak dengan nilai-nilai liberal, program tersebut juga akan mengubah arah politik Prancis secara keseluruhan bahkan akan mengubah konstitusi Prancis sebagai negara dengan mitra lembaga UE. Sebagaimana yang sering dikampanyekan oleh Le Pen, ia ingin melakukan referendum keanggotaan Prancis dalam UE (frexit). Marine Le Pen sebagai seorang pemimpin yang mewakili suara rakyat biasa ingin secara penuh melindungi kepentingan warga pribumi terkhusus para pekerja. Marine le Pen akan berjanji mendorong kebijakan yang mana lebih memprioritaskan kepentingan nasional, dimana yang selama ini selalu bertentangan langsung dengan aturan UE.

Kebijakan yang dipublikasi oleh partai Le Pen, setidaknya berisikan kebijakan domestik dan kebijakan internasional. Kebijakan domestik yang berisikan beberapa program secara penuh untuk kepentingan rakyat dan kepentingan nasional Prancis, seperti memperoteksi ekonomi, kedaulatan moneter dan menolak perjanjian perdagangan bebas, menolak impor, keluar dari zona euro dan Schengen, membatasi imigrasi bahkan akan mengembalikan mata uang nasional Prancis.

Setelah pemilu Prancis dilaksanakan pada bulan Mei, dengan hasil polling yang telah memenangkan Emanuel Macron sebagai Presiden Prancis. Macron telah mendapatkan hampir dua pertiga suara dan berhasil mengalahkan Le Pen dengan hasil telak. Data hasil polling terakhir Macron mendapat 66%, sedangkan Le Pen hanya mendapatkan 34% suara (Association, 2017). Sebelumnya pada putaran pertama yang dilaksanakan 23 April 2017, Emanuel Macron mendapatkan 23,75% disusul dengan suara Marine Lee Pen mendapatkan hasil 21,53%. Marine Le Pen berhasil menyingkirkan kandidat dari partai lainnya yaitu Francois Fillon dari Partai Republik (LR) dengan 19,91%, Jean-Luc Melenchon dari La France insoumise (FI) dengan 19,64% dan yang terakhir diduduki oleh Partai Sosialis (PS) Benoit Hamon dengan 6,2%. Marine Le Pen setidaknya telah mendapatkan 7,6 juta pada putaran pertama yang membuat dirinya dapat berhasil maju ke putaran kedua sebagai oposisi utama (Samuel, 2017). Walaupun hasil putaran kedua tidak membawa Le Pen naik di kursi kepresidenan, namun dia mampu mengumpulkan 11 juta pemilih. Le Pen telah meraup dua kali lipat suara yang didapatkan ayahnya saat mecalonkan diri menjadi Presiden di tahun 2002 silam. Peningkatan jumlah dukungan tersebut untuk pertama kali terjadi dalam partai FN tentu hal ini menunjukkan seberapa sukses strategi normalisasi persepsi FN diopini publik (Cabanès, 2017, pp. 5-6). Sehingga bisa dikatakan bahwa kebijakan wacana “Marine Le Pen 2017” yang berisikan 144 komitmen Presiden telah berhasil mempengaruhi politik masyarakat Prancis (National, 2017).

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan apa yang sudah diuraikan dalam latar belakang, dengan beberapa data yang sudah peneliti kumpulkan. Maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

Bagaimana proses pembentukan wacana kebijakan “144 Komitmen Marine Le Pen“ oleh Front Nasional (FN) dalam kampanye Presiden 2017 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang sudah ditentukan, maka peneliti mengasumsikan bahwa ada beberapa tujuan mengapa penelitian ini diperlukan untuk menjawab hipotesa atau rumusan masalah. Penulis mencoba untuk melihat bagaimana dinamika perpolitikan Prancis saat ini, mengingat benua Eropa sedang mengalami gelombang populisme di beberapa kawasan. Benua Prancis yang notabene merupakan negara yang cukup dominan dalam penerapan liberalisme saat ini sedang mengalami ketidakstabilan politik. Banyaknya isu-isu kontemporer yang tidak bisa terselesaikan dengan baik membuat masyarakat mulai khawatir dengan ancaman kepentingan nasionalnya. Adanya konsep globalisasi yang melekat serta prinsip-prinsip liberalisme dengan adanya kebebasan dan demokrasi telah memunculkan banyak masalah.

Bagaimana kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dalam partai Front Nasional sebagai partai sayap kanan dapat mempengaruhi politik masyarakat Perancis. Partai

Front Nasional (FN) telah mempublikasi kebijakan dalam proposal dokumen “Marine Le Pen 2017” sebagai program kampanye calon Presiden Prancis. Program tersebut telah mengadopsi nilai-nilai populis yang berhasil mendapat perhatian dari masyarakat, melalui pencapaian suara dukungan yang signifikan. Dalam kebijakan tersebut, setidaknya terdapat dua fokus kebijakan yaitu kebijakan domestik dan kebijakan luar negeri. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah menjawab bagaimana proses pembuatan kebijakan wacana tersebut sehingga telah berhasil mendapat dukungan dari kalangan masyarakat Prancis. Serta apa faktor yang mendorong pembentukan program-program kampanye Marine Le Pen tersebut sebagai kandidat partai sayap kanan Front Nasional (FN).

1.4 Signifikansi

Dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk melihat bagaimana proses perubahan tren politik yang terjadi di Prancis. Setelah 50 tahun Prancis didominasi oleh partai-partai yang pro dengan kelembagaan UE, baik Partai Republik dan Partai Sosialis selalu bergantian untuk berkuasa dan memimpin pemerintahan Prancis. Krisis yang terjadi di Prancis baik ekonomi, sosial dan politik menambah skeptisme masyarakat terhadap partai tersebut. Banyak kalangan dari masyarakat Prancis yang meligitimasi posisi UE sebagai pembatasan terhadap kedaulatan negara untuk kepentingan nasional. Sehingga norma dan nilai struktur UE sangat berpengaruh dalam memaksa negara anggota UE termasuk Prancis untuk mentaati aturan yang ada sesuai dengan moral yang berlaku sebagai anggota.

Partai FN sebagai aktor yang mewakili suara hak-hak populis, telah mendapat dukungan yang sangat signifikan. Terutama dalam pemilihan Presiden 2017, Marine Le Pen sebagai kandidat dari partai FN yang berhasil menyingkirkan partai mainstream pada putaran pertama. Serta pada hasil putaran terakhir, Marine Le Pen berhasil meraup 11 juta pemilih yang merupakan jumlah tertinggi sepanjang perjalanannya. Sehingga signifikansi dari penelitian ini adalah selain meneliti isu kontemporer, penelitian ini juga bagaimana FN dapat mempengaruhi dinamika politik Prancis sebagai negara anggota UE. Prancis yang merupakan salah satu negara yang menginisiasi terbentuknya UE, namun isu Frexit telah menjadi perhatian kalangan akademisi dan media online. Sehingga penelitian ini akan melihat bagaimana FN sebagai partai sayap kanan membentuk sebuah wacana kebijakan sesuai dengan faktor norma-norma yang berlaku baik dalam domestik dan internasional.

1.5 Cakupan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, bahwa terlalu luasnya pembahasan yang akan penulis teliti oleh karenanya penulis membatasi cakupan penelitian. Penelitian ini berfokus kepada arah politik (ide dan gagasan) secara umum dari Partai Sayap Kanan Front Nasional (FN) sehingga akan terlihat bagaimana ide tersebut dapat mempengaruhi politik masyarakat Perancis. Melihat bahwa sejak FN dipimpin oleh Marine Lee Pen, banyak kebijakan-kebijakan yang lebih berpihak pada rakyat (populis). Kedua, bagaimana Proses FN membentuk kebijakan wacana partai seiring dengan pengaruh atau faktor-faktor yang melatar belakangi gagasan tersebut. Cakupan penelitian ini dimulai pada tahun 2011-2017, sesuai dengan masa

kepemimpinan Marine Le Pen yang berhasil meningkatkan suara dukungan secara signifikan.

1.6 Kajian Pustaka

Pembentukan Uni Eropa (UE) merupakan suatu model dari produk liberalisme yang menjadi ideologi dominan di Benua Eropa. Uni Eropa adalah sebuah organisasi ekonomi dan politik yang cukup berpengaruh di dunia dalam tatanan sistem internasional. Selain telah mencapai perbaikan bertahap dengan perluasan keanggotaan dan bidang kerja sama, UE juga telah memperkuat posisinya sebagai aktor internasional. Langkah-langkah perkembangan ini juga adalah usaha penekanan adanya identitas politik bersama. Sesuai dengan jurnal yang ditulis oleh Sare Aydın Yılmaz yang menjelaskan bahwa proses perubahan EU yang luar biasa merupakan sebuah model pembentukan identitas yang dapat dianalisis dengan pendekatan konstruktivisme. Bagaimana fenomena tersebut dapat mengungkapkan pentingnya hubungan sosial dan bagaimana hubungan tersebut dapat ditempuh dengan baik. UE telah melalui perubahan dalam penciptaan sebuah identitas politik Eropa, dimana UE memberikan sebuah tanda yang jelas terkait prinsip dan norma yang diadopsi, melalui deklarasi, perjanjian, kebijakan yang dikonsolidasikan secara bersama. Hal tersebut dirancang dengan sebuah hak-hak demokrasi, kebebasan dan HAM sebagai prinsip universal dalam identitas politik Uni Eropa baik internal maupun eksternal. Sehingga identitas politik dalam bentuk seperti ini telah menjadi bagian struktur yang sangat kokoh dan konstan dalam perkembangan Uni Eropa di era kontemporer (Yılmaz, 2014, pp. 50-67).

Integrasi Uni Eropa yang telah memantapkan 70 tahun dengan prinsip demokrasi dan kapitalisme mulai mengalami ketidakstabilan. Seperti halnya dalam buku yang ditulis oleh Nora Langenbacher, tulisan tersebut terkait perkembangan ekstremisme sayap kanan dan populisme sayap kanan. Partai sayap kanan mulai bangkit dan semakin kuat sejalan tantangan era kontemporer saat ini yang menjadi tantangan bagi Uni Eropa. Eksistensi partai sayap kanan beberapa tahun mulai meningkat bahkan di negara-negara besar seperti Prancis dan Jerman yang notabane negara yang sangat berpengaruh di Eropa. Dalam buku tersebut lebih menekankan pada menguatnya partai radikal sayap kanan sendiri atas dasar pemanfaatan isu sosial, penggambaran elit politik dan memberi asupan identitas nasional. Bahwa penekanan partai sayap kanan radikal bertindak sebagai pembela "masalah sosial" sesuai dengan situasi sosial di setiap negara cukup berpengaruh dalam pertumbuhan mereka (Langenbacher & Schellenberg, 2011, pp. 17-25).

Dalam politik internasional kontemporer saat ini adanya penyaluran ideologi saat ini lebih diterapkan pembentukan identitas dalam sebuah partai. Dimana partai sebagai alat untuk memegang kekuasaan dan pengontrolan terhadap kebijakan baik pemerintah maupun masyarakat. Sehingga baik paham liberal maupun komunisme sering diidentikan dalam ideologi partai. Walaupun spektrum partai politik lebih mempunyai banyak varian, namun sering dikenalkan dengan sebutan partai kanan dan partai kiri. Penyebutan kelompok kiri dan kelompok kanan pada era saat ini, Perlunya memahami terkait sejarah pemakaian istilah tersebut. Dalam buku yang ditulis oleh Elliot H Durham yang menjelaskan terkait bagaimana asal mula istilah

tersebut digunakan. Dalam spektrum politik adanya istilah “sayap kanan” dan “sayap kiri” lebih sering disebut sebagai label simbolis untuk kelompok liberal dan kelompok konservatif. Penggunaan kategori ini dengan tujuan pengelompokan partai yang berbeda dimana dengan demikian memetakan bidang politik. Namun dalam sejarahnya memang mengacu pada pengaturan tempat duduk politisi selama Revolusi Prancis. Pemisahan tempat duduk pada saat itu sebagai dua faksi antara kelompok pendukung raja dan penentang raja. Hingga pada abad ke-19, label tersebut terus digunakan untuk mengklasifikasi “partai sayap kanan” dan “partai sayap kiri”. hingga istilah tersebut sekarang digunakan untuk menggambarkan spektrum politik yang berlawanan seperti perbedaan ideologi. Bahkan mereka masih menggunakan pengaturan pembagian duduk dalam badan legislatif. Dalam buku tersebut juga mendukung terkait dasar pemikiran dari kedua partai tersebut. Sayap kiri ditandai dengan adanya prinsip kebebasan, kesetaraan, hak, kemajuan, reformasi dan internasionalisme. Sedangkan sayap kanan lebih menekankan pada wewenang, hirarki, tradisi, tugas dan nasionalisme. Ilmuan politik dan para analisis menganggap kaum sayap kanan seperti konservatis, fasis dan tradisional. (Durham, 2017, pp. 41-43)

Partai sayap kanan jauh merupakan partai yang memiliki pertumbuhan yang cukup cepat, dimana banyak beberapa peneliti yang melihat bahwa partai sayap kanan ini telah menjadi partai yang sukses. Dalam Jurnal Matt Golden menjelaskan terdapat kebangkitan partai ini di beberapa negara belahan Eropa. Para ilmuwan telah mengklasifikasikan partai sayap kanan jauh berdasarkan pada radikalisme atau

ekstremisme, populisme, dan nasionalisme. Kebangkitan partai ini membuat alarm secara luas yang membuat gelisah para pembuat politik, akademisi dan media. Dalam jurnal tersebut, penulis membagi dua variabel dalam penelitiannya yaitu adanya sisi permintaan dan penawaran dalam analisis keberhasilan partai sayap kanan ini. Dalam sisi permintaan memusatkan pada ‘keluhan’ yang akan menciptakan sebuah ‘permintaan’. Sedangkan pada variabel penawaran dimana bagaimana pilihan keputusan yang akan dibuat oleh partai tersebut dapat mempengaruhi kesempatan politik mereka (Golder, 2016, pp. 477-97)

Salah satu partai sayap kanan jauh yang sukses berkembang adalah partai Front Nasional (FN) di Prancis. Partai sayap kanan-jauh Front Nasional (FN) telah tumbuh menjadi partai yang cukup berkembang, dalam sejarah pembentukannya memang partai tersebut adalah partai yang tidak setuju atas pembentukan Integrasi Uni Eropa, sehingga tidak heran bahwa FN sering disebut partai Euroskeptis. Dalam Tesis yang ditulis oleh Alexandra Campione yang menjelaskan bagaimana faktor meningkatnya dukungan FN terutama berangkat dari isu krisis ekonomi yang melanda Eropa. Dimana dalam penelitian tersebut penulis mengasumsikan bahwa yang melatarbelakangi pertumbuhan dukungan terhadap FN adanya situasi Prancis yang tidak stabil pada masa Hollande yaitu masa pemerintahan sebelumnya. Penulis mengidentifikasi bahwa situasi Prancis yang semakin memburuk dalam ekonomi, politik dan sosial. Dibuktikan bahwa masyarakat Prancis mulai skeptis dengan kepemimpinan Hollande dan beralih mendukung FN, dimana Lee Pen mampu memainkan isu tersebut untuk untuk mendapat keuntungan popularitasnya. Fakta ini

merupakan bagian integral dari kedua strategi partai menuju ke 2017 pemilihan umum. Hal itu di buktikan adanya peningkatan dukungan FN dari 2009 ke pemilu 2014 (Campione, 2015, pp. 33-42)

Kelompok partai sayap kanan-jauh sendiri terdapat dua kelompok dengan prinsip yang berbeda. Dalam thesis yang ditulis Elise Saint-Martin, tulisan tersebut menggambarkan kelompok partai sayap kanan-jauh membagi dua kelompok yaitu 'extremisme sayap kanan' dan 'radikalisme sayap kanan'. Seringkali kedua kelompok tersebut mempunyai nilai yang sama, namun radikal sayap kanan merupakan jenis yang muncul pada era 1970-an. Para akademisi menyederhanakan kedua karakteristik tersebut dengan pandangan yang mendasar mereka terhadap demokrasi. Pihak ekstrem kanan cenderung anti-konstitusional dan anti demokratis yang dalam praktiknya seperti *anti-partyism*, *anti-parliamentarianism*, dan *anti-pluralism*. Serta ekstrem kanan sangat menolak adanya prinsip kesetaraan manusia secara fundamental yang artinya mempunyai fitur nasionalisme, rasisme, dan exclusionisme. Sedangkan dengan pihak radikal kanan masi nominal menerima demokrasi prosedural dan juga mematuhi lembaga-lembaga politik yang demokratis. dalam orientasinya radikal sayap kanan mungkin anti-demokrasi tetapi tidak benar-benara memusuhi demokrasi liberal.

Front Nasional (FN) sering kali disebut sebagai partai yang menjadi cikal bakal diantara partai-partai radikal sayap kanan di seluruh bagian Eropa. sejak didirikan pada tahun 1972, FN telah memimpin pada gelombang ketiga di awal 1980an menjadi partai yang paling mapan dari jenisnya. Hingga tahun 2000an secara

konsisten mampu mencapai 15% dari suara nasional. Bahkan banyak para akademi menjadikan partai Front Nasional (FN) sebagai “*New Radical Right*” sebagai model partai sayap kanan terkemuka di Eropa. Partai radikal kontemporer mengklaim mempromosikan xenophobia, etno-nasionalisme, otoritarianisme sosial budaya, dan anti-sistem populisme. Sehingga dalam tulisan tersebut mengkategorikan FN sebagai model partai radikal kanan atas 3 unsur dari platform politik FN. Pertama, FN terus mempromosikan anti-imigrasi sebagai bentuk melindungi hak tradisi pribumi. Kedua, FN telah membentuk kebijakan-kebijakan dengan menggunakan ancaman ketidakamanan yang menggambarkan ideologi *socioauthoritarian* dari radikal kanan. Ketiga, menciptakan isu adanya euro-globalisasi yang memperluas atas unsur-unsur strategi dari nial nasionalisme-populisme radikal kanan (Saint-Martin, 2013, pp. 1-6).

1.7 Landasan Teori

Sesuai dengan masalah yang terjadi di Eropa terutama dalam analisis dinamika politik Perancis, penulis menggunakan pendekatan Konstruktivisme sebagai landasan teori. Teori ini lahir sebagai pembaharuan terhadap teori sebelumnya seperti realisme dan liberalism. Terdapat beberapa tokoh-tokoh pemikir konstruktivisme dalam studi Hubungan Internasional seperti Friedrich Kratochwill, John Ruggie, Nicholas Onuf dan Alexander Wendt (Jackson & Sorensen, 2007, p. 206). Teori Konstruktivisme pertama kali diterapkan dalam politik internasional oleh Nicholas Greenwood Onuf dengan istilah “Konstruktivisme” dalam hubungan internasional pada tahun 1989. Karya terkenalnya tentang konstruktivisme ada dalam buku “World

of our Making”, dia berpendapat bahwa negara selayaknya seperti manusia yang hidup (Onuf, 1989, p. 5).

Konstruktivisme sendiri merupakan teori sosial yang dikembangkan dalam studi sosiologi. Dalam studi hubungan internasional konstruktivisme digunakan untuk menjelaskan fenomena dunia pasca Perang Dingin. Melihat bahwa teori sebelumnya seperti realisme atau neorealisme dan liberalisme atau neoliberalisme sendiri hanya menjelaskan yang bersifat material. Sehingga banyak tokoh konstruktivis yang tidak puas terhadap penjelasan dari teori sebelumnya dalam menjelaskan realitas hubungan internasional. Seperti terkait bagaimana persoalan dinamika perubahan internasional, sifat dasar praktik kelembagaan ataupun lahirnya masalah hak asasi manusia (Burchill, 2001, pp. 195-196).

Beberapa pemikir yang cukup terkenal salah satunya adalah Alexander Wendt yang menulis buku terkait adanya teori sosial. Konstruktivisme sendiri lebih menekankan pada ide atau gagasan dalam memahami perilaku dunia internasional. Seperti halnya teori konstruktivisme lahir sebagai teori baru yang memperdebatkan teori sebelumnya yang hanya memahami situasi yang bersifat materil. Konstruktivisme hadir untuk meyakini bahwa adanya negara, perang, sistem internasional, nuklir dan bentuk lain yang muncul dalam dunia internasional adalah hasil dari konstruk ide. Seperti dalam buku yang terkenal Wendt bahwa kehidupan sosial adalah “*ideas all the way down*”, yang artinya bahwa ide atau gagasan akan mempengaruhi adanya pembentukan sistem dengan perilaku para aktornya. Konstruktivisme juga meyakini bahwa terkadang faktor ideasional (pemikiran)

memiliki kekuatan yang lebih besar dari kekuatan materi. Dalam buku Alexander Wendt juga terdapat dua prinsip utama dalam konstruktivisme yang pertama, adanya struktur dari asosiasi manusia bukan hanya ditentukan oleh kekuatan material namun adanya *shared ideas* yang mana dilakukan oleh interaksi para aktor. Kedua, bahwa adanya identitas dan kepentingan aktor bukan dibangun dengan sendirinya namun dibentuk atas gagasan atau ide dengan tujuan tertentu (Wendt A. , 1999, pp. 92-96). Bagi Wendt perlu menjunjung tinggi adanya peran identitas sebagai salah satu faktor membentuk kepentingan dari perilaku negara terhadap dinamika agen dan struktur. Seperti dalam asumsi dasar Wendt dalam “*Social Theory of International Politics*” dalam bukunya yang menerangkan bahwa,

Constructivism is a structural theory of the international system that makes the following core claims: (1) states are the principal units of analysis for international political theory; (2) the key structures in the states system are intersubjective rather than material; and (3) state identities and interests are in important part constructed by these social structures, rather than given exogenously to the system by human nature [as (neo)realists maintain] or domestic politics [as neoliberals favour].

(Wendt A. , 1999, p. 35)

Dalam klaim konstruktivisme Wendt di atas, artinya dalam menganalisa fenomena hubungan internasional adanya variable idealis merupakan kekuatan yang sangat penting yang terbentuk secara sosial. sehingga identitas yang terbentuk melalui proses interaksi menjadi penentu yang mendasari perilaku aktor dalam membentuk sebuah kebijakan baik dalam negeri maupun luar negeri. Kaum konstruktivisme meyakini bahwa terdapat hubungan yang saling berkaitan antar satu dengan lainnya

dalam proses interaksi antar aktor, agen dengan adanya fenomena yang terjadi dalam kehidupan dunia. Dimana pengetahuan yang ada saat ini merupakan konstruksi sosial. Sehingga kaum konstrutivis meyakini terdapat elemen penting diantaranya identitas, agen, struktur dan aksi yang saling berkaitan dalam pembentukan struktur sosial (Wendt A. , 1999, pp. `135-138)

Prinsip-prinsip utama konstruktivisme yang dikemukakan oleh Alexander Wendt menekankan pada pandangannya terhadap fislosofis Thomas Hobbes, John Locke dan Immanuel Khant yang bercirikan pada 3 budaya anarki. Dalam konstruktivisme yang di kemukakan oleh Alaxnder Wendt dalam melihat sistem internasional (anarki) terdapat 3 sistem yaitu Hobbesian sistem terkait perang dan konflik, Lockean Sistem mengenai adanya rivalitas, dan Kantian Sistem mengenai kerjasama. Ketiga sistem tersebut merupakan prinsip utama Wendt dalam menggambarkan perubahan dalam isu-isu hubungan internasional. Dimana setelah Hobbesian Sistem telah gugur setelah terjadinya perang dingin yang membuat negara berhenti berkonflik dan melakukan kerjasama akibat munculnya isu-isu baru di kanca internasional. Sehingga hal tersebut membuat lahirnya aktor-aktor baru non-negara yang terlibat dalam interaksi politik (Wendt A. , 1999, pp. 246-248). Pemikiran Wendt melihat peradaban modern saat ini memusatkan pada sistem Lockean dengan adanya persaingan antar negara serta pada sistem Kantian yang melihat negara-negara saat ini memlih untuk saling bekerjasama untuk menguntungkan satu sama lainnya. sehingga pandangan tersebut melihat bahwa fenomena dunia internasional telah

mengalami dinamika perubahan dari sistem Lockean ke sistem Kantian begitupun sebaliknya.

Pada tahun 1990an, di era perkembangannya konstruktivisme di kategorikan dalam 3 bentuk yang berbeda yaitu “sistemik,” “unit level,” dan “holistic.” Dimana ketiga kategori tersebut di kelompokkan sesuai dengan aliran para pemikir konstruktivis yang berbeda.

1. konstruktivisme sistemik, dalam kategori ini mengadopsi perspektif neo-realis dalam “Third-image” dengan fokus interaksi antar aktor negara kesatuan. Lebih tepat dalam contoh model konstruktivis sistemik ini di contohkan dalam karya tulisan Alexander Wendt. Dimana dalam fokus Wendt menerangkan konstruktivis yang terjadi dalam interaksi antar negara ruang lingkup internasional. Sehingga dalam perspektif ini berfokus pada struktur ideasional dan normative dari lingkungan internasional dan mengabaikan perubahan di ranah politik luar negeri
2. konstruktivisme level unit, merupakan kategori yang sebaliknya dari sistemik dimana fokus dalam tingkat unit/domestik. Dimana aliran ini diwakili oleh Peter Katzenstein dalam melihat tingkat unit di sini berkonsentrasi pada hubungan antar sosial domestik, norma, hukum, identitas dan kepentingan negara serta strategi keamanan negara. Namun, level unit disini sebagai negara tidak begitu penting mengingat bahwa ideasional atau norma individu bisa berperan lebih penting dalam domestik. Dalam hal ini karakter individu

dapat mempengaruhi interaksi sosial di dalam negara. Sehingga individu dapat mempengaruhi kebijakan suatu negara (Tamaki, 2015, p. 14).

3. konstruktivisme holistik dimana menjadi jembatan bagi kedua kategori yang sebelumnya yaitu sistemik dan level unit. Dimana aliran ini diwakili oleh pemikir John G. Ruggie dan Friedrich Kratochwil yang menjembatani antara aspek internasional dan domestik dalam menjelaskan bagaimana identitas dan kepentingan negara bisa terbentuk. Dalam perspektif analisisnya mereka berusaha untuk memperlakukan domestik dan internasional sebagai dua wajah tunggal dalam tatanan sosial dan politik (Reus-Smit, 2005, pp. 199-201)

Konstruktivis holistik ini merupakan sebuah perspektif umum yang telah menghasilkan analisis perubahan internasional yang beragam, namun keduanya saling melengkapi antara fokus pada pergeseran besar sistem internasional dan juga perubahan sistem modern. Baik Ruggie dan Kratochwil dalam karyanya sama-sama memusatkan perhatian pada bagaimana fenomena domestik dan internasional berinteraksi satu sama lain untuk menentukan peraturan untuk menyusun tatanan internasional. Sehingga konstruktivis holistik dapat menjelaskan sistem dan perubahan sistemik. Dalam pandangan holistik, perilaku kebijakan luar negeri adalah konsekuensi dari interaksi antara kedua identitas baik identitas korporasi (domestik) dan identitas sosial (internasional). Menurut pendekatan ini juga setiap transformasi dalam identitas korporasi maka akan mempengaruhi pembentukan identitas di tingkat internasional sehingga negara akan mengubah prioritas mereka ke identitas yang baru (Price & Reus Smit, 2014, pp. 262-269) . Dari perspektif di atas, penelitian ini sesuai

dengan pendekatan yang dibangun oleh konstruktivis holistik dalam menyoroti pentingnya ide dan norma-norma internal dan eksternal dalam membentuk sebuah kebijakan luar negeri. Sehingga baik identitas domestik maupun norma-norma dalam identitas masyarakat internasional memiliki dampak tersendiri dalam menganalisa kepentingan dan perilaku negara.

Perubahan dukungan masyarakat Eropa terhadap partai politik sangat mempengaruhi pergerakan ideologi partai itu sendiri. Seperti halnya yang terjadi di Eropa saat ini, banyaknya partai dominan yang kehilangan dukungannya tentu membuat partai sayap kanan semakin kuat dengan memanfaatkan kesempatan tersebut. Setelah Marine Le Pen mengubah citra partai yang lebih populis dalam masa hampir 7 tahun, FN telah tumbuh dengan dukungan yang cukup pesat dalam perkembangannya. Hingga hasil pemilu 2017 membuat partai tersebut mampu meraup suara 11 juta masyarakat Perancis, dan menjadi oposisi utama dalam pemilihan presiden yang telah menyingkirkan para kandidat partai lainnya. Sehingga "*Shared Idea*", yang di keluarkan dalam kebijakan kampanye FN telah mampu menggubah politik masyarakat Perancis.

Dalam asumsi konstruktivisme itu sendiri yang percaya bahwa adanya politik internasional kontemporer saat ini adalah sebuah 'ide' yang dibentuk melalui sebuah identitas. Dimana identitas juga sangat berpengaruh dalam pembentukan struktur dan kepentingan. Adanya peran partai sayap kanan dalam mempengaruhi dinamika politik Perancis adalah sebuah model kekuatan dari adanya ide. Mengingat bahwa partai politik merupakan sebuah organisasi dengan menganut sebuah ideologi yang di

dalamnya terdapat beberapa kelompok, tujuan dibentuknya partai politik sangat berkaitan dengan kekuasaan, serta membentuk dan mengontrol kebijakan terjadi terhadap pemerintah ataupun publik (Budiarjo, 1989, p. 159). Sehingga wacana dan usaha yang dibentuk oleh Front Nasional Perancis dalam membentuk sebuah asumsi publik sebagai satu tindakan untuk jalan mereka mendapatkan kepentingan dalam pemerintahan. Sesuai dengan perspektif konstruktivistik holistik, bahwa transformasi yang akan berubah dalam politik domestik yang sedang terjadi di Perancis akan berpengaruh dalam pengambilan kebijakan luar negeri Perancis di tingkat internasional.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Metode yang akan dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sosial yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Data penelitian ini adalah data kualitatif (tanpa angka-angka dan bilangan), dimana akan bersifat substansif dengan interpretasikan melalui rujukan, acuan, dan referensi ilmiah. Penelitian ini juga menggunakan susunan deskriptif analisis yang merupakan metode penelitian dengan menganalisis, mengelola, meneliti data-data yang sudah terkumpul sehingga akan menghasilkan kesimpulan dan di susun dengan sistematis agar masalah tersebut dapat di pahami. Metode deskriptif juga sebagai metode untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran mengenai obyek yang akan diteliti dengan cara mengumpulkan sumber.

1.8.2 Subjek Penelitian

Dalam menentukan subyek penelitian ini sesuai dengan metode yang digunakan oleh penulis yaitu dengan menggunakan metode kualitatif maka menjadikan data adalah subyek penelitian. Dimana data atau sumber yang dapat bukan hanya sebagai media pendukung tetapi juga sebagai subyek atau sumber utama penelitian. Tipe penelitian ini juga bukan hanya dalam data sistematis namun terdapat analisis hubungan antar variabel (Leng, 2002, p. 117). Sehingga penelitian ini akan menganalisis fenomena dari sejarah atau budaya dari negara tersebut melalui literatur yang telah didapat sehingga data adalah sebagai rujukan utama penelitian ini.

1.8.3 Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini akan menggunakan cara pengambilan data dengan data sekunder. Data diperoleh dengan mencari sumber-sumber yang mendukung penelitian tulisan ini yaitu dengan buku-buku ilmu hubungan internasional, metodologi penelitian, dan materi-materi yang mendukung tulisan ini. Sumber-sumber tersebut didapatkan melalui studi literatur termasuk akses data melalui internet. Akses internet dilakukan dengan selektif melalui alamat situs yang kredibilitasnya dapat dipercaya. Data yang telah didapatkan, kemudian akan dipilih sesuai dengan tema penelitian. (sugiyono, 2009).

1.8.4 Proses Penelitian

Proses penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah dengan cara analisa data. Peneliti akan mengumpulkan data dari sumber-sumber yang telah didapat baik jurnal, buku atau pun dari media cetak yang bersifat kredibilitas yang terpercaya. Proses penelitian akan dilakukan secara sistematis yaitu dimulai dengan mengelola data, meneliti dan menganalisis sumber yang telah terkumpul sehingga akan menghasilkan sebuah kesimpulan dari rumusan masalah yang penulis teliti. Mengingat bahwa metode yang dipakai oleh penulis adalah metode deskriptif kualitatif maka kajian yang didapat hanya bersumber dari literatur atau kajian pustaka yang dapat mendukung penelitian.